

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Partai Keadilan Sejahtera

Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera tidak terlepas dari peran Muhammad Natsir, ketua umum Partai Masyumi yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Setelah pemerintahan Presiden Soeharto melarangnya aktif dalam politik, Muhammad Natsir tidak menyerah begitu saja. Pada tahun 1967, beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) bersama dengan tokoh eks Masyumi. Melalui DDII, beliau berpolitik melalui dakwah.

Dakwah politik yang menjadi semangat DDII memasuki lembaga-lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK), gerakan dakwah politik ini secara masif memasuki masjid-masjid yang ada di berbagai kampus.

Pada tahun 1980, intelektual muda lulusan berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah kembali ke tanah air. Mereka kemudian berpadu dengan gerakan dakwah Natsir yang terlebih dahulu muncul di kampus-kampus. Gerakan tarbiyah ini muncul disebabkan karena kaum muda intelektual yang banyak diantaranya merupakan lulusan dari perguruan tinggi di Timur Tengah kembali ke Indonesia dengan membawa semangat dakwah dan dedikasi tinggi. Selain itu, adanya LDK memfasilitasi semangat mereka untuk menyalurkan ilmu yang mereka dapatkan di Timur Tengah dengan akses ke kampus dan masjid-masjidnya.<sup>1</sup>

Momentum reformasi tahun 1998 membuka peluang bagi gerakan tarbiyah untuk turut serta mengisi reformasi. Melalui gerakan dakwah dan tarbiyah tersebut, Partai Keadilan (PK) lahir, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1998. Karena PK lahir dari jamaah, maka doktrin yang ditanamkan adalah “al-jamaah hiya al hizb, wa al-hizb huwa al-jamaah” (jamaah adalah partai, dan partai adalah jamaah).

---

<sup>1</sup> M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, *Prahara Partai Islam Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS* hal. 110

9 Agustus 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi PK, karena pada tanggal itu PK dideklarasikan di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Karena PK didirikan oleh aktivis dakwah, maka PK mengasosiasikan diri sebagai partai dakwah. Menurut Fahri Hamzah, istilah partai dakwah merujuk pada pendapat bahwa politik adalah bagian dari dakwah.

Sebelum PK terbentuk, sebetulnya beberapa tokoh pendiri PK sempat melakukan pendekatan ke beberapa partai politik Islam yang telah ada seperti PPP, serta para tokoh politisi Islam senior. Nur Mahmudi menawarkan konsep tentang partai politik Islam yang akan dibentuk. Namun, konsep yang dibawa Nur Mahmudi tidak dapat diterima. Nur Mahmudi dan rekan-rekan lalu membentuk PK karena konsep yang mereka bawa tidak diterima. Latar belakang penamaan Partai Keadilan muncul karena para tokoh pendiri melihat permasalahan yang sangat pelik di Indonesia saat itu adalah masalah keadilan. Nama Partai Keadilan menurut Nur Mahmudi mudah diingat oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan latar belakang para pendiri Partai Keadilan, Vedi R Hadiz dalam M. Amir Nurdin mengemukakan bahwa partai dakwah tersebut didirikan oleh para tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (Kisdi) dan eks anggota Masyumi. Para pendiri PK tersebut umumnya berprofesi sebagai guru dan teknokrat profesional.

Dalam perkembangannya, Partai Keadilan (PK) berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2002. PK hadir sebagai respon reformasi dan menginginkan kehidupan berbangsa yang lebih baik sebagai agenda reformasi seperti, *goodgovernance*, anti korupsi, penegakan keadilan, kebebasan pers dan sebagainya. Menurut Asef Bayat dalam M. Amir Nurdin, sebagai parpol berideologi Islam, PK berkeyakinan bahwa Islam sebagai jalan hidup memberi banyak petunjuk, termasuk bagaimana politik dijalankan. Kehadirannya pascareformasi menyoroti soal penegakan keadilan, pemerintahan yang bersih dan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan sejarah munculnya PK/PKS, Burhanuddin Muhtadi dalam M. Amir Nurdin membagi

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 111

<sup>3</sup> Ibid, hal. 112

kemunculannya menjadi tiga babakan utama. Pertama, Partai Keadilan Sejahtera lahir dari gerakan tarbiyah yang muncul di kampus. Kedua, pelembagaan gerakan tarbiyah yang ada di kampus. Ketiga, lembaga yang ada di kampus-dalam hal ini KAMMI, turut andil dalam gerakan reformasi 1998.<sup>4</sup>

Lahirnya PK dari gerakan dakwah sebetulnya tidak dikehendaki oleh sebagian anggota perkumpulan (jamaah) dakwah. Mereka tetap ingin bersama dalam jamaah tetapi menolak bergabung parpol (PK). Para aktivis dakwah yang umumnya eks tokoh Masyumi, memunculkan anggapan bahwa PK merupakan *next* Masyumi. Terdapat hubungan ideologi antara Masyumi dan PK. Keduanya berada pada rel perjuangan menegakkan syariat Islam dan menginginkan Islam sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Imdadun Rahmat menyebutkan bahwa PK juga terpengaruhi dan mengadopsi ideologi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Keterpengaruhan tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan PK seperti sistem *ursoh*, *halaqoh* dan juga filosofi partai. PK adalah satu-satunya parpol Islam di Indonesia yang mengadopsi ideologi dari luar negeri.<sup>5</sup>

Sebagai partai baru yang lahir dari reformasi, PK punya gaya baru dalam berpartai. Greg Fealy dalam M. Amin Nurdin menyebutkan setidaknya ada lima gaya partai PK yang berbeda dari kebanyakan. Pertama, dalam hal ideologi, PKS memang memilih Islam sebagai asas. Tetapi, PK mencoba menyontoh ideologi organisasi luar negeri, Ikhwanul Muslimin. Kedua, sistem kaderisasi PK sangat ketat. Ketiga, dalam menanggapi bencana alam, PK selalu hadir di tengah masyarakat, dan hal ini yang jarang dilakukan semua parpol. Keempat, Fealy menyebut PK sebagai parpol yang "menjadikan moralitas dalam kehidupan politik". Di tengah maraknya korupsi yang dilakukan kader-kader partai, kader PK relatif "bersih", meski pada perkembangan selanjutnya ada pula yang terjerat kasus.<sup>6</sup>

Yon Mahmudi dalam M. Amin Nurdin menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (kelanjutan dari PK). sekalipun diidentikkan dengan partai Islam, tapi dalam praktiknya berupaya untuk mengambil pelajaran dari dua parpol Islam "legendaris" Indonesia, Masyumi dan NU. Dalam

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 113

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid, 113-114.

berpolitik di negara demokrasi, PKS membuka diri terhadap pembagian kekuasaan (power sharing). dan di saat yang sama berupaya menjaga komitmen ideologi yang menjadi konsensus parpol.<sup>7</sup>

Menengok upaya kelembagaan parpol pascareformasi, Partai Keadilan Sejahtera termasuk paling berhasil dibanding partai lainnya. Pengkaderan dilakukan dengan baik serta kadernya difasilitasi dengan kesempatan untuk tampil dan mendapat posisi penting di partai. Selain keberhasilan pengkaderan, PKS juga mampu menampilkan program-program partai yang memikat hati pemilih.

Sebagai partai Islam. PKS gencar melakukan kampanye keprihatinan terhadap umat Islam di berbagai negara Islam seperti Palestina, Irak, Lebanon dan Afghanistan. PKS juga berkampanye anti zionis "Israel". Kampanye tersebut menjadi distingsi yang cukup menonjol antara PKS dan parpol Islam lainnya. PKS terus konsisten dalam memperjuangkan umat Islam yang mengalami penindasan di negara-negara Timur Tengah.

## 2. **Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera**

PKS yang sebelumnya PK lahir sebagai “anak reformasi yang menyuarakan perubahan diberbagai bidang. Ibarat sebuah produk tafsir yang tidak lepas dari konteks zamannya, demikian pula dengan munculnya PKS yang tak terlepas dari konteks reformasi. Berbagai kegagalan Orde Baru menjadi titik pijak PKS untuk turut serta membangun Indonesia.

Berbagai persoalan sesaat setelah Presiden Suharto lengser seperti buruknya tata kelola pemerintahan, banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tumpulnya penegakan keadilan menjadi perhatian PKS. Atas dasar itu, tujuan PKS seperti tertera dalam anggaran dasar (AD) adalah “mewujudkan cita-cita Indonesia seperti tercantum dalam UUD 1945, dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah”.<sup>8</sup>

Melalui latar belakang reformasi, PKS mengusung visi “terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat”. Untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan di Indonesia, bagi PKS tidak ada pilihan lain selain

---

<sup>7</sup> Ibid, 114.

<sup>8</sup> Ibid. 115-116.

mewujudkan masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, PKS mencontohkan “Piagam Madinah” yang menjadi konstitusi negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Di era “jahiliyah” (abad 7 Hijriyah), Nabi Muhammad telah menciptakan sebuah aturan yang cukup “modern” saat itu. Semangat Piagam Madinah adalah gotong royong, perdamaian dan persaudaraan guna mencapai kesejahteraan.<sup>9</sup>

Partai Keadilan Sejahtera memiliki dua cara untuk mencapai masyarakat madani yang partai cita-citakan, yaitu dengan kombinasi Islamisasi kultural dan struktural. Islamisasi kultural adalah mendialogkan ajaran Islam dengan kultur budaya Indonesia. Sedangkan Islamisasi struktural adalah menyatukan antara Islam sebagai agama dengan sistem politik untuk mengatur masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa Partai Keadilan Sejahtera menghendaki adanya kesatuan agama dan negara. Meski demikian, Partai Keadilan Sejahtera tidak ingin menerapkan sistem syariah. Bagi Partai Keadilan Sejahtera, pilihan tepat adalah menerapkan nilai-nilai Islam untuk kepentingan bangsa melalui peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah partai, Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk meneruskan perjuangan dan mengisi kemerdekaan. Untuk itu, visi yang ditekankan Partai Keadilan Sejahtera juga tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui keduanya, maka predikat Indonesia sebagai negara yang bermartabat dapat diraih.

Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan platform partai yang meliputi tiga bidang utama, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk mencapai visi tersebut. Di bidang politik, Partai Keadilan Sejahtera memiliki misi “mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, hukum, pertahanan dan keamanan”. Di bidang ekonomi, Partai Keadilan Sejahtera bertekad “mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.” Di bidang sosial budaya, Partai Keadilan Sejahtera bertekad untuk

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 116.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 116-117.

“membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa.”<sup>11</sup>

Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa konflik internal parpol masih menjadi “hantu” politik pascareformasi. Berbagai konflik kemudian memunculkan parpol-parpol baru. Hal ini disebabkan penanaman ideologi yang tidak dilakukan secara matang.

**3. Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera**

Kiprah Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu menunjukkan perolehan suara yang relatif stabil. Rata-rata Partai Keadilan Sejahtera mendapat suara di angka 8 juta kecuali pada pemilu pertamanya pada tahun 1999. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara di angka 8 juta dalam tiga kali pemilu berturut-turut. Perolehan ini tidak bisa dianggap sebagai stagnansi Partai Keadilan Sejahtera. Walau kenaikan suaranya hanya sedikit, angka 8 juta suara adalah sebuah prestasi Partai Keadilan Sejahtera di tengah badai yang terus merundungnya.

Meski dihantam badai konflik, Partai Keadilan Sejahtera relatif “canggih” dalam mengelola konflik internal sehingga konflik tidak berlarut-larut dan terdengar kalangan luar partai. Hal ini terutama sekali disebabkan kultur Partai Keadilan Sejahtera yang berawal dari kelompok pengajian sehingga para jamaah (kader partai) sangat patuh terhadap arahan pimpinan mereka. Selain itu, konflik internal Partai Keadilan Sejahtera yang jarang terdengar di telinga publik disebabkan janji kader Partai Keadilan Sejahtera untuk tidak mengumbar persoalan “dapur” partai keluar ke muka publik.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera**  
**Sejak Pemilu 1999**

<b>Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sejak 1999</b>	
<b>Pemilu</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Pemilu 1999	1.436.656 suara
Pemilu 2004	8.149.457 suara
Pemilu 2009	8.204.946 suara
Pemilu 2014	8.480.204 suara

Sumber: Badan Pusat Statistik

<sup>11</sup> Ibid, hal. 117.

Kenaikan suara cukup signifikan didapatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2019. Menurut data dari website pemilu2019.kpu.go.id, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara dalam pemilu legislatif DPR tingkat pusat sebesar 8,21%, yaitu sebesar 11.493.663 suara. Dibandingkan dengan perolehan suara pemilu legislatif DPR tingkat pusat, Partai Keadilan Sejahtera mengalami kenaikan suara cukup signifikan dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 2014 yang hanya 6,79% yaitu sebesar 8.480.204 suara.

Kenaikan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera cukup mengejutkan karena ketika pemilu berlangsung, Partai Keadilan Sejahtera tengah mengalami konflik dengan Fahri Hamzah yang menggugat partai karena telah memecatnya.

Lembaga Survey Indonesia bahkan pernah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera akan gagal lolos *parliamentary threshold* pada pemilu 2019 dalam survey yang mereka lakukan pada tanggal 7-14 Januari 2018.<sup>12</sup> Namun hasil akhir pemilu berkata lain karena Partai Keadilan Sejahtera mengalami kenaikan suara yang cukup signifikan.

Beberapa pihak menilai kenaikan suara Partai Keadilan Sejahtera ini karena sikap politik partai yang tegas dan konsisten menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.<sup>13</sup> Kenaikan suara yang didapatkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2019 tidak didapatkan hanya karena mereka mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini karena Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga tidak mengalami kenaikan suara yang cukup signifikan. Bahkan perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu 2019 mengalami penurunan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, “PKS, PAN Dan Hanura Terancam Tak Lolos Ambang Batas Parlemen,” last modified 2018, accessed March 5, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180124154658-32-271279/pks-pan-dan-hanura-terancam-tak-lolos-ambang-batas-parlemen>.

<sup>13</sup> Tempo, “Pengamat: PKS Yang Paling Jelas Sikap Politiknya,” last modified 2019, accessed March 5, 2022, <https://pemilu.tempo.co/read/1228110/pengamat-pks-yang-paling-jelas-sikap-politiknya/full&view=ok>.

<sup>14</sup> Bisnis.com, “Ternyata, 2 Hal Ini Penyebab Perolehan Suara PKS Naik Di Pemilu 2019,” 2019, accessed March 5, 2022, <https://kabar24.bisnis.com/>

Beberapa pihak menilai, kenaikan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah imbas dari gerakan 212. Menurut Mardani Ali Sera yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Kepemudaan dalam wawancaranya dengan Tempo, 21 April 2019, menyebut bahwa peningkatan suara Partai Keadilan Sejahtera yang cukup signifikan disebabkan oleh gerakan 212. Partai Keadilan Sejahtera cukup aktif dalam menggerakkan massa pendukung Partai Keadilan Sejahtera dan alumni gerakan 212 untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mardani menyebut bahwa kemungkinan kenaikan suara Partai Keadilan Sejahtera disebabkan oleh dua hal, pertama yaitu penetrasi kader, struktur, dan anggota legislatif PKS pada basis massa bukan PKS. Kedua, suara umat karena di kubu 02 (pasangan Prabowo-Sandiaga) hanya PKS yang partai Islam.<sup>15</sup>

#### 4. Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya berada di daerah Pantai Utara (Pantura). Secara geografis, Kabupaten Kudus masuk ke dalam Karesidenan Pati. Kabupaten Kudus berbatasan dengan 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Pati sebelah selatan, Kabupaten Pati di sebelah timur, dan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2020 adalah 849.184 jiwa yang terdiri dari 423.777 jiwa laki-laki (49,90 persen) dan 425.407 jiwa perempuan (50,10 persen). Kecamatan Jati memiliki persentase penduduk terbesar, yaitu 13,13 persen dari penduduk Kabupaten Kudus. Kecamatan Bae memiliki persentase penduduk terkecil, yaitu 8,70 persen dari penduduk Kabupaten Kudus.<sup>16</sup>

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog,

---

read/20190418/15/913205/ternyata-2-hal-ini-penyebab-perolehan-suara-pks-naik-di-pemilu-2019.

<sup>15</sup> Beritasatu, "Presiden PKS: Kenaikan 3 Juta Suara PKS Bukan Karena Prabowo-Sandi."

<sup>16</sup> BPS Kudus, "Kabupaten Kudus Dalam Angka 2021," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus* 1, no. 1 (2021): 1188–1197.



dan Dawe. 9 Kecamatan tersebut dibagi dalam 4 daerah pemilihan (dapil).

**Tabel 4.2**  
**Daftar Daerah Pemilihan dan Perolehan Kursi**  
**di Kabupaten Kudus**

Nama dapil	Wilayah dapil	Jumlah Kursi
Kudus 1	Jati, Kota Kudus	11
Kudus 2	Gebog, Kaliwungu	11
Kudus 3	Dawe, Jekulo	11
Kudus 4	Bae, Mejobo, Undaan	12
Total		45

Sumber: Keputusan KPU nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memiliki dua Wali Songo yang menyiarkan agama Islam di sekitar pegunungan Muria dan sekitar Kudus menjadikan Kabupaten Kudus sebagai kota santri, berbagai macam pondok pesantren yang berdiri di Kabupaten Kudus, dan destinasi wisata ziarah makan Wali Songo menjadikan Kudus sebagai kota dengan corak agama Islam yang kental. Lebih istimewa lagi, warga Kudus memegang rasa toleransi yang tinggi sebagai budaya turun-temurun yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Menara Kudus menjadi simbol utama toleransi antar umat beragama dengan gaya bangunan yang memadukan antara budaya Islam dan Hindu.

Meski Kabupaten Kudus dikenal sebagai kota santri, tidak serta merta menjadikan partai Islam berkuasa. Meski partai Islam tidak mendominasi dalam perpolitikan di Kabupaten Kudus, Partai Keadilan Sejahtera cukup diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada di Kabupaten Kudus. Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan perolehan 4 kursi pada kontestasi Pemilu 2019 lalu.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kudus**  
**Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin**

Partai Politik	Lk	Pr	Jml
PDI-P	8	-	8
Partai Kebangkitan Bangsa	6	1	7
Partai Gerindra	8	-	8
Partai Golkar	6	1	7
Partai Nasdem	4	-	4
Partai Keadilan Sejahtera	3	1	4
PAN, Hanura, Demokrat	6	1	7
Jumlah	41	4	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus (2021).

Empat raihan kursi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Kudus didapatkan partai dengan konsisten menjalankan program kerja partai. Program-program partai secara langsung menjangkau masyarakat, salah satunya adalah membeli hasil panen cabai dan gabah petani dengan harga layak ketika harga tengah anjlok.

Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus cukup konsisten, meski jumlah suara yang didapatkan naik turun. Sejak keikutsertaan Partai Keadilan pada Pemilu 1999, yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, partai terus mendapatkan kursi di kontestasi lokal Kabupaten Kudus.

**Tabel 4.4**  
**Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera**  
**di Kabupaten Kudus Sejak Pemilu 1999**

Pemilu Legislatif	Jumlah kursi didapatkan di Kabupaten Kudus
Pemilu 1999	1
Pemilu 2004	1
Pemilu 2009	1
Pemilu 2014	4
Pemilu 2019	4

Sumber: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah peneliti jalankan akan dijabarkan dalam bagian ini. Pemaparan hasil penelitian ini dirangkum dalam dua tema besar, yaitu mengenai bentuk-bentuk konflik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus serta cara pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus memanaajemen konflik yang terjadi.

### 1. Bentuk-bentuk Konflik yang Terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus

Konflik adalah hal yang wajar terjadi dalam sebuah organisasi, tak terkecuali partai politik yang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Berbagai macam pemikiran para anggotanya yang berbeda-beda pasti akan bersinggungan di dalam tubuh partai. Untuk itulah partai harus pandai memanfaatkan perbedaan pendapat yang muncul untuk merumuskan solusi terbaik sebagai jawaban atas permasalahan masyarakat yang partai dengarkan.

Menurut Robbins yang mengklasifikasikan pandangan konflik menjadi tiga pandangan, konflik yang umumnya dialami oleh organisasi adalah konflik relasi antar manusia. Dalam pandangan tersebut, konflik bisa terjadi karena dalam organisasi, hubungan antar manusia itu dinamis, sehingga pada suatu titik akan menimbulkan perbedaan pendapat antar manusia di dalam organisasi yang berpotensi memunculkan konflik.

Hasil penelitian menemukan bahwa konflik yang terjadi di dalam Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus berasal dari dua hal, yaitu konflik yang berasal dari internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus itu sendiri; dan konflik internal di kepengurusan pusat Partai Keadilan Sejahtera yang berefek ke kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

Konflik yang terjadi di dalam internal Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus adalah konflik realistik yang merupakan bentuk konflik menurut pandangan Lewis Coser. Konflik realistik adalah bentuk konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai.

Konflik realistik berfokus pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Dalam menghadapi konflik

realistis ini Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus menggunakan metode manajemen konflik dengan dialog, persuasi, musyawarah, voting dan negosiasi. Partai menggunakan cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang umum terjadi di internal kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera.

Selain pandangan konflik realistis menurut Lewis Coser, ada pandangan lain mengenai bentuk konflik yang terjadi antar anggota DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus. Bentuk konflik terjadi di internal DPD yang merupakan konflik antar anggota DPD merupakan konflik inter personal. Konflik inter personal merupakan bentuk konflik menurut pandangan Ruchyat.

Sedangkan, dalam konflik internal di kepengurusan pusat Partai Keadilan Sejahtera yang berefek ke kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus ini lebih condong kepada konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok di dalam partai. Konflik inter kelompok dalam organisasi ini juga merupakan bentuk-bentuk konflik menurut pandangan Ruchyat. Dalam pandangan ini, Ruchyat membagi bentuk-bentuk konflik menurut pihak-pihak yang berkonflik. Menurut Ruchyat, ada 6 bentuk konflik yaitu: Konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intra kelompok, konflik inter kelompok, konflik intra organisasi dan konflik inter organisasi.

Konflik inter kelompok dalam organisasi ini terjadi karena munculnya dua kelompok besar di dalam kepengurusan pusat Partai Keadilan Sejahtera yang saling konflik kepentingan, yang mengerucut ketika Fahri Hamzah yang merupakan loyalis kubu Anis Matta, dikeluarkan dari Partai Keadilan Sejahtera. Dampak dari dikeluarkannya Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera juga memicu gelombang pemecatan pengurus partai di daerah yang dianggap berkubu ke Anis Matta, yang salah satu diantaranya adalah mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah, Kamal Fauzi.

## **2. Tanggapan Pengurus Partai Mengenai Konflik yang Terjadi di Internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus**

Salah satu fungsi partai menurut Miriam Budiarmo adalah sarana komunikasi politik. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, tentunya akan ada aspirasi yang saling

bersinggungan yang akan menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini akan rawan menimbulkan konflik antar anggota partai, yang akan merugikan partai jika tidak dikelola dengan benar.

Mengenai perbedaan pendapat di internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, partai sendiri tidak mempermasalahkan jika anggota saling berbeda pendapat. Partai menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.

Seperti yang disampaikan oleh Sayid Yunanta, ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, bahwa: “Secara umum, partai tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang partai tidak inginkan adalah perbedaan pendapat yang berujung pada perpecahan.”<sup>17</sup> Pendapat ini juga diperkuat oleh Mafulla, yang menjabat di Bidang Keumatan dan Kesra DPD PKS Kab. Kudus. Beliau berpendapat bahwa: “Semua orang boleh mengemukakan pendapat dalam wadah partai. Ketika perbedaan pendapat yang berujung konflik terjadi, partai menganggap itu sebagai proses pendewasaan dalam berdemokrasi.”<sup>18</sup>

Jika ada konflik yang terjadi di dalam internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, umumnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Para kader dan anggota partai secara sadar berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sebelum membesar menjadi konflik yang destruktif.

Seperti yang disampaikan Agus Susilo, ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Kaliwungu. Beliau berpendapat bahwa: “Meski perbedaan pendapat terjadi, tidak akan mengarah pada perpecahan yang destruktif. Partai menekankan penyelesaian masalah yang terjadi secara kekeluargaan.”<sup>19</sup>

Konflik di internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus biasanya terjadi menjelang Pemilu. Ketika itu akan banyak perbedaan pendapat terkait strategi pemilu yang akan partai jalankan yang rentan menimbulkan gesekan-

---

<sup>17</sup> Sayid Yunanta, wawancara oleh penulis, 27 September, 2021, transkrip.

<sup>18</sup> Mafulla, wawancara oleh penulis, 18 Februari, 2022, transkrip.

<sup>19</sup> Agus Susilo, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, transkrip.

gesekan antar anggota yang berakibat pada timbulnya konflik. Selaras dengan yang disampaikan oleh Ruston Harahap, anggota legislatif DPRD Kabupaten Kudus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang berpendapat bahwa: “Perbedaan pendapat yang berujung konflik di dalam partai biasanya berupa kinerja dalam menghadapi pemilu, umumnya berupa perbedaan pandangan dalam menjalankan strategi pemilu dan langsung diselesaikan ketika pemilu berakhir.”<sup>20</sup>

Penyelesaian dari konflik yang terjadi menjelang pemilu ini, akan dilaksanakan oleh partai ketika Pemilu berakhir. Para pengurus partai mengedepankan penyelesaian konflik dengan cara islami sesuai dengan ideologi partai yang merupakan partai dakwah.

### **3. Konflik yang Terjadi di Kepengurusan Pusat yang Berdampak pada Kepengurusan di Tingkat DPD**

Konflik yang terjadi di kepengurusan pusat yang berefek pada kepengurusan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus adalah konflik Partai Keadilan Sejahtera dengan Fahri Hamzah. Konflik ini merupakan gugatan yang dilayangkan oleh Fahri Hamzah terkait pemberhentian Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera karena sikap Fahri Hamzah yang dianggap tidak sesuai dengan Partai.

Penulis tidak bisa menggali lebih dalam soal konflik yang terjadi di pusat ini melalui wawancara karena pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera tidak begitu mengetahui secara detail konflik tersebut, sehingga penulis mengambil informasi terkait konflik ini melalui sumber-sumber pihak ketiga.

Konflik yang terjadi pada era ketua umum Sohiful Iman (2015-2020) ini bermula ketika Fahri Hamzah, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPR tahun 2014-2019 seringkali melontarkan pernyataan kontroversial yang tidak sesuai dengan partai.

Selain itu, beberapa pernyataan kontroversial Fahri juga menjadi bahan pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera untuk memberhentikannya. Pernyataan itu antara lain: ingin membubarkan KPK, siap pasang badan terhadap proyek-proyek DPR, terlalu berlebihan membela Setya Novanto, mencibir orang-orang yang menolak UU KPK.

---

<sup>20</sup> Ruston Harahap, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2022, transkrip

Persoalan ini kemudian dibawa ke Majelis *Tahkim* karena berhubungan dengan pemberhentian anggota. Majelis *Tahkim* sendiri adalah sebutan lain dari Mahkamah Partai seperti yang telah diatur dalam UU No. 02 tahun 2011 tentang Partai Politik. Anggota Majelis *Tahkim* dipilih melalui rapat DPP Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 28 Januari 2016 yang hasilnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.

DPP Partai Keadilan Sejahtera dalam prosesnya terus melakukan media dengan Fahri Hamzah. Majelis *Tahkim* tidak langsung memutuskan untuk memberikan Fahri vonis pemberhentian dari partai. Majelis *Tahkim* meminta teradu, Fahri Hamzah untuk mengklarifikasi sekaligus memberikan pembelaan. Sikap Fahri yang tidak kooperatif membuat kedua belah pihak sulit dipertemukan. Majelis *Tahkim* lalu memutuskan untuk memberhentikan Fahri dari seluruh jenjang keanggotaan PKS pada 11 Maret 2016 melalui Surat No. 02/PUT/MT-PKS/2016. Keputusan ini bersifat mengikat.

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang aktivis, Fahri Hamzah tidak gentar dengan vonis pemecatan yang dirinya terima. Fahri menolak pemberhentiannya dari Partai Keadilan Sejahtera karena sikap dan pernyataan kontroversialnya. Fahri membela diri kalau pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan dilindungi oleh konstitusi. Kecewaan Fahri tak terbendung karena cara penyampaian partai mengenai pemecatan dirinya hanya melalui kurir, bukan secara resmi. Fahri kemudian menggugat partai secara perdata terkait pemecatan dirinya yang ia nilai tidak sah.

Fahri menganggap bahwa pemecatan dirinya tidak hanya terkait dengan pernyataan kontroversial yang ia lontarkan. Menurut Fahri, ada perbedaan konsepsi partai politik dengan dirinya dimana ia menganggap bahwa partai masih menggunakan pendekatan informal. Pendekatan informal yang partai gunakan dalam proses pemecatan Fahri dinilai menjadi preseden buruk dalam kelembagaan politik partai yang akan berdampak ke panggung kekuasaan. Maka dari itu Fahri menahannya dan merasa tidak ingin meneruskannya.<sup>21</sup>

Sidang gugatan pemecatan Fahri yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 2016, diawali dengan sidang mediasi. Fahri menggugat beberapa elit PKS yang saat itu masih menjabat di

---

<sup>21</sup> M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, *Prahara Partai Islam Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS*. 218

posisi strategis partai, diantaranya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (2015-2020) Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis *Tahkim* (2015-2020) Hidayat Nurwahid, Ketua Dewan Syariah (2015-2020) Surahman Hidayat, Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (2015-2020) Abdul Muis. Dalam sidang ini, para tergugat tidak menghadiri sidang ini. Fahri menyangkan dan menyebut bahwa Sohibul Iman sebagai ketua umum saat itu sangat sibuk karena menjadi mengurus partai dan DPR secara bersamaan. Fahri kemudian meminta agar sebaiknya Sohibul Iman mengundurkan diri dari Presiden PKS karena merangkap jabatan sebagai anggota DPR. Pada prosesnya, sidang gugatan tersebut kemudian dimenangkan oleh Fahri Hamzah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa pencopotan Fahri Hamzah dianggap tidak sah.

DPP Partai Keadilan Sejahtera kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan yang memenangkan gugatan Fahri Hamzah. Upaya banding DPP Partai Keadilan Sejahtera atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mendapat jawaban dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada 7 Desember 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan putusan ini, Partai Keadilan Sejahtera tidak berhak mencopot Fahri dari kursi Wakil Ketua DPR RI. Selain dimenangkannya Fahri melalui hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera juga diwajibkan membayar kepada Fahri Hamzah sebesar Rp 30 miliar sebagai ganti rugi atas pemecatannya. Partai juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama baik Fahri.

Fahri menyangkan adanya pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh elit partai kepada kader-kader partai yang dianggap sebagai loyalis Anis Matta semenjak ia berkonflik dengan partai. Menurut Mahfudz Sidiq (politisi Partai Keadilan Sejahtera yang dianggap kubu Anis Matta), terdapat beberapa ketua Dewan Perwakilan Wilayah (setingkat provinsi) yang dicopot karena diindikasikan sebagai loyalis Anis Matta antara lain: Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera provinsi Jawa Tengah, Kamal Fauzi dan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera provinsi Sumatera Selatan Erza Saladin. Selain itu ada 32 kader Partai Keadilan Sejahtera provinsi Maluku Utara yang dipecat. Tidak hanya memberhentikan kader-kader di daerah, Fahri juga mengungkapkan jika Partai Keadilan



Sejahtera juga akan memberhentikan kader-kader yang sudah senior. Kultur partai yang mengedepankan diskusi dinilai Fahri telah luntur karena tindakan partai yang memberhentikan kader secara sepihak. Fahri menganggap bahwa elit Partai Keadilan Sejahtera menjadi otoriter karena memberikan keputusan secara sepihak. Fahri menyayangkan karena hal ini terjadi saat mendekati Pemilu 2019.

Setelah keluar dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah memilih untuk tidak bergabung dengan partai lain karena menghormati Partai Keadilan Sejahtera, dan memilih untuk membentuk ormas baru. Fahri Hamzah, Anis Matta dan beberapa mantan elit partai yang ‘disingkirkan’ oleh Partai Keadilan Sejahtera lalu mendeklarasikan organisasi masyarakat Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia). Arah Baru Indonesia sebenarnya telah diinisiasi oleh Anis Matta ketika masih menjadi presiden pengganti Partai Keadilan Sejahtera. Arah Baru Indonesia sempat direncanakan sebagai agenda yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.

Kepopuleran Garbi membuat Anis Matta mentransformasikan Garbi menjadi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Pendirian Partai Gelora ini memicu para loyalis Anis Matta di Partai Keadilan Sejahtera untuk berpindah partai.

#### **4. Tanggapan Pengurus Partai Mengenai Konflik yang Terjadi di Kepengurusan Pusat yang Berdampak pada Kepengurusan di Tingkat DPD**

Dampak dari konflik di kepengurusan pusat Partai Keadilan Sejahtera juga mendera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus walau efeknya tidak besar. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus memang mengalami penurunan perolehan suara dalam Pemilu 2019, walau jumlah kursi yang diperoleh tetaplah sama.

Hal ini senada dengan pendapat Ruston Harahap mengenai dampak konflik yang terjadi di kepengurusan pusat. Beliau berpendapat bahwa “Ketika ada tekanan tersendiri di partai baik secara internal maupun eksternal, partai mampu menghadapinya dan menepis anggapan bahwa partai akan mengalami penurunan suara dengan adanya berbagai kasus yang menghantam di kepengurusan pusat, dibuktikan dengan hasil pemilu PKS di tahun 2014 dan 2019 yang mengalami kenaikan suara di tingkat nasional. Namun di Kudus ada

penurunan suara di Pemilu 2019, meski jumlah kursi DPR tetap. Penurunan suara yang terjadi setelah dievaluasi bukan karena dampak konflik internal yang tengah terjadi di kepengurusan pusat.”<sup>22</sup>

Dampak dari sisi penurunan suara memang belum begitu dirasakan karena puncak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat ini terjadi menjelang Pemilu 2019. Berdirinya Partai Gelora sebagai muara konflik DPP Partai Keadilan Sejahtera dengan Fahri Hamzah terjadi setelah Pemilu 2019. Berdirinya Partai Gelora memicu beberapa kader partai di daerah untuk keluar dari Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung dengan Partai Gelora.

Memang, dampak dari konflik yang memunculkan partai baru ini tidak semasih dengan yang terjadi di daerah lain, utamanya di daerah yang menjadi basis massa Anis Matta dan Fahri Hamzah. Namun para pengurus DPD dan DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus tidak menampik bahwa ada beberapa anggotanya yang keluar dan memilih untuk bergabung ke Partai Gelora.

Berkenaan dengan itu, Sayid Yunanta mengatakan bahwa: “DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus menganggap konflik yang terjadi di pusat ini sebagai hal yang biasa. Partai menghargai perbedaan pendapat itu. Konflik yang terjadi di pusat tidak mempengaruhi kepengurusan partai di Kudus. Misalkan ada yang ingin memisahkan diri, partai mempersilahkan namun menyangkan kader yang ingin memisahkan diri tanpa memunculkan persepsi negatif yang berlebihan.”<sup>23</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ruston Harahap. Beliau mengatakan bahwa: “Beberapa kader memang ada yang berpindah ke Partai Gelora. Kami tidak menampik hal tersebut. Meski begitu kami tidak mengetahui secara pasti berapa. Namun persentasenya sangatlah sedikit. Kami tetap menjaga hubungan baik dengan mereka yang memilih untuk berpindah.”<sup>24</sup>

Pengurus DPD dan DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus belum mengetahui secara pasti berapa

---

<sup>22</sup> Ruston Harahap, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2022, transkrip

<sup>23</sup> Sayid Yunanta, wawancara oleh penulis, 27 September, 2021, transkrip.

<sup>24</sup> Ruston Harahap, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2022, transkrip

banyak simpatisan partai yang memilih untuk mendukung Partai Gelora. Lebih lanjut, dalam pernyataannya Ruston Harahap mengungkapkan bahwa: “Sampai saat ini kami belum mengetahui dampak secara pasti dampak dari konflik di pusat yang melahirkan Partai Gelora. Dampak berdirinya Partai Gelora belum dapat kami ketahui karena Partai Gelora belum pernah mengikuti Pemilu. Kami tidak akan mencampuri terlalu jauh urusan partai lain dan memilih untuk menyolidkan barisan kader sendiri.”<sup>25</sup>

Di tingkat DPC Kecamatan Kaliwungu, dampak berdirinya Partai Gelora juga belum dirasakan. Menurut Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Kaliwungu, Agus Susilo, mengungkapkan bahwa: “Memang benar di pusat terjadi konflik yang berujung pada pembentukan partai baru. Tetapi sejauh ini di DPC Kecamatan Kaliwungu secara resmi belum ada kader yang berpindah. Kalaupun nanti ada kader yang memilih berpindah ke partai lain, kami menyikapi hal itu dengan baik. Jika memang ada kader yang memilih untuk pindah ke Partai Gelora, kami menyayangkan hal tersebut tetapi kami tidak menghalang-halangi jika memang ada yang berpindah.”<sup>26</sup>

Dari pernyataan yang dikemukakan para pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus bisa disimpulkan bahwa para pengurus tidak terlalu menanggapi secara berlebihan kader yang memilih untuk keluar, namun tetap menyayangkan jika ada kader yang berpindah ke Partai Gelora.

##### **5. Gambaran Umum Manajemen Konflik di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus**

Solidnya para kader Partai Keadilan Sejahtera memudahkan para pengurus untuk memajemen konflik yang terjadi di partai. Para kader DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus memiliki kesadaran agar partai harus solid kapanpun itu. Sistem pengkaderan partai yang baik dinilai sangat penting dalam upaya resolusi konflik yang terjadi karena kader partai selalu ditekankan untuk mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan pribadi.

Sistem kaderisasi yang baik menjadi faktor utama partai dalam mencegah konflik keras yang terjadi di internal

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Agus Susilo, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, transkrip.

DPD. Sebagai partai dakwah, para kader partai yang berawal dari kelompok pengajian sangat patuh terhadap arahan pemimpin partai sehingga para kader tetap satu suara dalam menjalankan tujuan partai yang tertuang dalam AD/ART.<sup>27</sup>

#### 6. Manajemen Konflik Terkait Konflik yang Berasal dari Internal DPD Partai Keadilan Sejahtera

Terkait dengan konflik yang mengitari kepengurusan partai di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, para pengurus DPD memiliki cara tersendiri untuk memajemen konflik yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus. Secara umum, partai akan menggunakan pendekatan Islami dalam penyelesaian konflik karena Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai Islam.

Sesuai dengan pernyataan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, Sayid Yunanta. Beliau berpendapat bahwa: “Kami menggunakan cara *ishlah* dengan *tabayyun* dan mengajak berbicara secara mendalam untuk menyelesaikan masalah secara persuasif, dan menghindari untuk menggunakan hukum-hukum positif.”<sup>28</sup> Pendapat ini juga diperkuat oleh Agus Susilo, yang berpendapat bahwa: “Tentunya sebagai partai yang berasaskan islam, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akan mengutamakan akhlak islami sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah, dalam hal ini musyawarah. Ketika konflik tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka dengan terpaksa akan diselesaikan melalui jalur hukum.”<sup>29</sup>

Terkait cara penyelesaian konflik, Ruston Harahap berpendapat bahwa: “Umumnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan islami yang kami lokalisir. Pendekatan ukhwah antar kader mampu mempersolid hubungan antar kader maupun masyarakat. Di dalam partai kami ditekankan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat.”

Dengan cara bertabayyun, para pengurus partai mencoba akan mencari tahu pokok permasalahan yang mengitari konflik tersebut. Dengan bertabayyun, para pengurus partai mencari kebenaran di dalam konflik yang terjadi agar

---

<sup>27</sup> M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, *Prahara Partai Islam Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS*. 131

<sup>28</sup> Sayid Yunanta, wawancara oleh penulis, 27 September, 2021, transkrip.

<sup>29</sup> Agus Susilo, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, transkrip.

menemukan pendekatan yang sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi. Dalam menghadapi konflik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, para pengurus partai umumnya akan melokalisir pendekatan konflik yang terjadi. Lokalisasi ini didasarkan pada pandangan bahwa konflik yang terjadi di daerah pemilihan satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda.

Partai akan menerima saran dari kader dan anggota partai untuk mencari cara terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus. Partai tidak menutup untuk menerima saran dari perempuan yang menjadi kader dan anggota partai. Partai akan sangat menghargai pendapat yang dikemukakan para perempuan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Mafulla. Beliau mengatakan bahwa: “Partai sangat menghargai pendapat para perempuan. Partai akan mendengar pendapat yang dikemukakan oleh perempuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Partai memerlukan cara pandang perempuan terhadap konflik yang berbeda dari cara pandang para bapak-bapak pengurus partai dalam menghadapi konflik dan menghargainya sebagai pertimbangan dalam penyelesaian konflik.”

#### **7. Manajemen Konflik Terkait Konflik yang Berasal dari Kepengurusan Pusat Partai Keadilan Sejahtera**

Pendekatan yang berbeda dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera ketika menghadapi dampak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat, yaitu konflik DPP Partai Keadilan Sejahtera dengan Fahri Hamzah yang berakhir dengan berdirinya Partai Gelora. Berdirinya Partai Gelora memicu beberapa kader di Partai Keadilan Sejahtera untuk keluar dan bergabung dengan Partai Gelora.

DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus cenderung menghindari pembahasan terkait konflik tersebut, dan mempersilahkan jika ada yang ingin keluar dari partai. Terkait hal ini, Sayid Yunanta mengungkapkan bahwa: “Misalkan ada yang ingin memisahkan diri, partai mempersilahkan namun menyayangkan kader yang ingin memisahkan diri tanpa memunculkan persepsi negatif yang berlebihan. Meskipun sudah berbeda pandangan, pihak yang memisahkan diri tetaplah saudara sesama muslim karena itu

yang lebih utama. Dampak yang ditimbulkan dari konflik di pusat tidak masif dan tidak terlalu berlarut-larut memperlmasalahkan kemunculan partai baru tersebut dan menganggapnya hanya partai baru biasa.”<sup>30</sup>

Pendapat ini juga diperkuat oleh Agus Susilo terkait dengan fenomena keluarnya beberapa kader partai sebagai dampak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat. Beliau berpendapat bahwa: “Memang benar di pusat terjadi konflik yang berujung pada pembentukan partai baru. Tetapi sejauh ini di DPC Kecamatan Kaliwungu secara resmi belum ada kader yang berpindah. Kalaupun nanti ada kader yang memilih berpindah ke partai lain, kami menyikapi hal itu dengan baik. Jika memang ada kader yang memilih untuk pindah ke Partai Gelora, kami menyayangkan hal tersebut tetapi kami tidak menghalang-halangi jika memang ada yang berpindah”<sup>31</sup>

Sampai saat ini pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera belum mengetahui dampak secara pasti dampak dari konflik di pusat yang melahirkan Partai Gelora. Dampak berdirinya Partai Gelora belum dapat DPD ketahui karena Partai Gelora belum pernah mengikuti Pemilu. Pengurus DPD tidak akan mencampuri terlalu jauh urusan partai lain dan memilih untuk menyolidkan barisan kader sendiri.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Analisis Bentuk-bentuk Konflik yang Terjadi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus

Secara teoritis, konflik adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi. Termasuk diantaranya adalah partai politik. Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat rentan akan timbulnya konflik di internalnya karena persinggungan pihak-pihak yang aspirasinya saling bertentangan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai manajemen konflik di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, dalam menjalankan fungsi-fungsi partai, DPD Partai Keadilan Sejahtera menghadapi berbagai macam bentuk konflik yang penanganannya tentu tidak sama antara bentuk konflik satu dengan yang lainnya.

---

<sup>30</sup> Sayid Yunanta, wawancara oleh penulis, 27 September, 2021, transkrip.

<sup>31</sup> Agus Susilo, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2022, transkrip.

**a. Perspektif Teori Bentuk-bentuk Konflik Ruchyat**

Menilik dari jumlah individu yang terlibat dalam konflik, bentuk konflik yang sering dialami oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera adalah konflik interpersonal dan intra kelompok. Penggunaan teori tersebut berkenaan dengan permasalahan di partai yang umumnya berupa perselisihan antar individu di dalam partai atau perselisihan antar kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam partai.

Dalam konflik interpersonal, individu di dalam kepengurusan partai berkonflik dengan individu lainnya terlepas dari status dan jabatannya di partai. Sedangkan dalam konflik intra kelompok, pihak yang berkonflik adalah kelompok-kelompok di dalam partai. Kelompok-kelompok ini umumnya berupa pendukung loyal elit partai yang menciptakan kubu-kubu di dalam kepengurusan partai.

Konflik interpersonal di dalam DPD Partai Keadilan Sejahtera umumnya terkait dengan perbedaan kinerja partai saat Pemilu. Antar individu satu dengan yang lain bisa saja mengalami konflik akibat perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan strategi partai ketika Pemilu berlangsung.

Konflik intra kelompok yang terjadi di dalam DPD Partai Keadilan Sejahtera tidak dapat diidentifikasi dengan jelas karena keterbatasan akses informasi yang partai berikan terkait dengan faksi-faksi di dalam DPD. Namun, jika menilik dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat, konflik intra kelompok di dalam Partai Keadilan Sejahtera begitu terlihat ketika partai berkonflik dengan Fahri Hamzah yang merupakan loyalis Anis Matta. Para loyalis Anis Matta di dalam partai pun berbondong-bondong keluar dari Partai Keadilan Sejahtera ketika Anis Matta bersama Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora.

Terkait dengan loyalis Anis Matta di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, tidak diketahui secara jelas ada berapa, namun keberadaan mereka di kepengurusan DPD tetaplah ada mengingat para pengurus DPD tidak menampik jika ada kader yang keluar untuk bergabung dengan Partai Gelora.

### b. Perspektif Teori Pengelompokan Konflik Lewis Coser

Lewis Coser mengelompokkan konflik menjadi dua, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah ketidaksepahaman dalam organisasi mengenai tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut. Konflik ini memfokuskan interaksi masalah mendasar terkait konflik maupun objek konflik yang harus diselesaikan pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan konflik non-realistik adalah konflik yang mendorong agresi karena kebencian atau prasangka buruk untuk mengalahkan atau menyingkirkan pihak yang berkonflik.<sup>32</sup>

Berbeda dengan teori bentuk konflik Ruchyat yang menekankan pada seberapa banyak subyek konflik, teori pengelompokan konflik Lewis Coser ini lebih menekankan pada proses interaksi di dalam konflik. Konflik realistik merupakan konflik yang interaksinya bersifat positif karena bisa memunculkan sudut pandang baru terkait pencapaian tujuan organisasi, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan bagi partai. Sebaliknya, konflik non-realistik merupakan konflik yang interaksinya bersifat negatif karena dalam proses konfliknya diliputi rasa kebencian terhadap pihak lain yang berkonflik.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan teori di atas terhadap penelitian, konflik realistik yang berupa ketidaksepahaman dalam mencapai tujuan partai ini masih terkait dengan kinerja partai dalam Pemilu. Ketidaksepahaman ini muncul karena kadangkala strategi yang dijalankan partai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di daerah pemilihan. Kader yang berasal dari daerah pemilihan tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan terkait cara partai menjalankan strategi Pemilu.

Berangkat dari hasil penelitian, konflik non-realistik di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus tidak terlihat karena solidnya kader partai. Rasa persaudaraan atau *ukhuwah* antar kader yang tinggi sanggup meminimalisir konflik non-realistik yang terjadi di DPD Partai Keadilan Sejahtera.

---

<sup>32</sup> Siti Asiah Tjabolo, *Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi* (Surabaya: Pustaka Cendekia, 2017) 51-52.

<sup>33</sup> Ibid.



### c. **Perspektif Teori Bentuk Konflik Konstruktif-Destruktif**

Berangkat dari hasil penelitian yang menemukan bahwa secara garis besar konflik yang terjadi di internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus adalah konflik yang berasal dari internal DPD itu sendiri dan konflik internal yang berasal dari kepengurusan pusat. Kedua konflik yang mengitari DPD ini sangat kontras karena konflik yang berasal dari internal DPD merupakan konflik konstruktif yang sanggup menggerakkan partai ke arah positif. Sedangkan konflik yang berasal dari kepengurusan pusat dapat menjadi konflik yang destruktif jika terjadi secara masif di tubuh partai.

Konflik konstruktif mampu mempererat hubungan antar pihak-pihak di dalam partai yang berkonflik. Konflik yang terjadi di dalam kepengurusan partai diarahkan menjadi konflik yang produktif. Dalam hal ini, partai mampu mengarahkan konflik yang terjadi terkait dengan kinerja dalam Pemilu sehingga perolehan kursi DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 sama seperti Pemilu sebelumnya meski partai sedang didera konflik internal yang terjadi di pusat.

Konflik destruktif di dalam DPD Partai Keadilan Sejahtera sejauh ini belum pernah terjadi. Namun partai perlu mewaspadai agar dampak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat tidak terjadi secara masif di DPD Kabupaten Kudus. Sejalan ini pengurus DPD membiarkan jika ada kader yang memilih untuk keluar dan bergabung dengan Partai Gelora karena tidak terjadi secara masif, dan pengurus partai tidak ingin berlarut-larut ke dalamnya.

## 2. **Analisis Manajemen Konflik di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus**

Untuk memahami manajemen konflik yang pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus gunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori manajemen konflik berupa teori transformasi konflik Fisher, dkk.

### a. **Perspektif Teori Transformasi Konflik Fisher, dkk.**

Sesuai dengan teori yang disampaikan Fisher dkk, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus dalam menghadapi konflik yang terjadi memajemen konflik secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

Mengenai pencegahan konflik, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus menggunakan sistem kaderisasi partai untuk menanamkan pemikiran bahwa kepentingan partai lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga konflik yang keras bisa dikurangi. Terbukti dalam internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus belum pernah terjadi konflik yang sangat masif.

Mengenai penyelesaian konflik, pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus dinilai berhasil dalam menyelesaikan konflik di internal DPD karena sanggup meredam konflik yang terjadi akibat perbedaan pandangan dalam menjalankan strategi pemilu dengan mempertemukan mereka yang berkonflik tersebut untuk *ishlah*, dan sejauh ini tidak ada konflik antar kader dan anggota yang masif karena perbedaan pandangan dalam menjalankan strategi pemilu.

Untuk mencapai *ishlah*, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus mengutamakan tabayyun dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Tabayyun berarti mencari kejelasan hingga terang dan benar. Perintah tabayyun dijelaskan dalam surah Al Hujurah ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dari ayat di atas, *tabayyun* dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu kepada pembawa berita apakah bisa dipercaya atau tidak, dan pada isi berita itu berisi kebenaran atau tidak. Dengan *bertabayyun*, Partai akan menyeleksi informasi terkait permasalahan yang terjadi sehingga akan mencari cara agar *ishlah* dapat tercapai melalui penyelesaian konflik yang terbaik.

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus akan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dan menengahnya untuk mewujudkan perdamaian antar kedua belah pihak yang berkonflik. Partai sebagai pihak ketiga memakai cara resolusi konflik dalam perspektif Islam menggunakan cara mediasi, yang dalam Al Qur'an dikiaskan dengan kata hakam. Dengan cara mediasi, partai ingin mencapai ishlah antar kedua belah pihak yang berkonflik.

Jika memang konflik tidak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, dan anggota partai yang berkonflik tersebut memutuskan untuk keluar, partai mempersilahkan namun menyayangkan kader yang ingin memisahkan diri tanpa memunculkan persepsi negatif yang berlebihan. Meskipun sudah berbeda pandangan, pihak yang memisahkan diri tetaplah saudara sesama muslim karena itu yang lebih utama.

Terkait pengelolaan konflik, partai akan selalu mendorong agar konflik yang terjadi di internal DPD dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal yang cukup berbeda ditempuh partai ketika menghadapi dampak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat. Partai memilih untuk menghindari pembahasan terkait konflik tersebut dan seakan menghindar dengan tidak ikut campur ketika ada kader atau anggota yang ingin keluar partai karena ingin bergabung dengan Partai Gelora, dan cenderung membiarkan mereka yang ingin keluar dari partai karena dampak dari konflik yang terjadi di pusat.

Resolusi konflik yang ditempuh pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus berfokus pada cara resolusi konflik secara Islami. Sebagaimana dalam Surat Al Hujurat ayat 9, partai akan bertindak sebagai pihak ketiga untuk menengahi kedua pihak yang berkonflik untuk mewujudkan perdamaian, dengan menggunakan cara mediasi.

Partai cukup berhasil mentransformasikan konflik yang terjadi untuk menstabilkan perolehan suara partai dalam Pemilu 2019 lalu. Ketika Pemilu 2019 berlangsung, konflik yang terjadi di pusat belum sampai ke tahap di mana loyalis Anis Matta keluar dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mendirikan Partai Gelora. Partai

mentransformasikan konflik yang terjadi di pusat yang masih belum berlarut ini menjadi semangat agar para kader tetap fokus dalam usaha pemenangan Partai Keadilan Sejahtera di Pemilu legislatif tahun 2019. Hasilnya, partai tetap memperoleh 4 kursi di DPRD Kabupaten Kudus, meski ada penurunan suara yang terjadi. Penurunan suara yang terjadi setelah dievaluasi bukan karena dampak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat.

Partai juga melibatkan peran aktif perempuan dalam menganalisis konflik yang terjadi. Kerjasama antara pria dan wanita mempertimbangkan isu-isu yang timbul dari peran dan tanggungjawab yang berbeda. Kaum perempuan memiliki pengaruh yang besar dalam struktur sosial dan sejumlah strategi tertentu.

Partai sangat menghargai pendapat para perempuan. Partai akan mendengar pendapat yang dikemukakan oleh perempuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Partai memerlukan cara pandang perempuan terhadap konflik yang berbeda dari cara pandang pengurus partai yang sebagian besar merupakan laki-laki dalam menghadapi konflik dan menghargainya sebagai pertimbangan dalam penyelesaian konflik.

#### **b. Perspektif Teori Penanganan Konflik**

Selain menggunakan teori transformasi konflik, para pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus juga menggunakan teori penanganan konflik dalam manajemen konflik yang terjadi di internal partai. Adapun metode penanganan konflik yang partai jalankan ialah sebagai berikut:

##### **1) Mengurangi Konflik**

Partai menggunakan metode manajemen konflik berupa mengurangi konflik dalam menghadapi dampak konflik yang terjadi di kepengurusan pusat. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus memilih untuk mendinginkan persoalan terlebih dahulu (*cooling thing down*).

##### **2) Menyelesaikan Konflik**

Karena mengurangi konflik saja tidak cukup dalam menghadapi dampak dari konflik yang terjadi di pusat, pengurus partai menggunakan cara dominasi untuk meredam konflik. Cara dominasi ini berupa

*avoidance* atau menolak ikut campur dalam menghadapi dampak dari konflik yang terjadi di kepengurusan pusat. Partai memilih untuk tidak mengintervensi kader yang ingin keluar untuk bergabung dengan Partai Gelora.

Terkait dengan konflik yang terjadi di internal DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus sendiri, pengurus partai akan menggunakan penyelesaian secara integratif daripada dominasi. Pengurus partai ingin menyelesaikan konflik yang terjadi di internal DPD dengan jalan konsensus, yaitu kebulatan suara terkait dengan kesepakatan penyelesaian masalah yang terjadi. Untuk mencapai konsensus ini, partai mengadakan musyawarah.

Selain dengan cara konsensus, pengurus partai juga menggunakan cara penyelesaian secara integratif yaitu *Superordinate goals*.<sup>34</sup> Partai ingin mengalihkan fokus kader pada tujuan yang lebih tinggi untuk mengalihkan perhatian pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuan bersama pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini partai biasa memasang target yang ingin dicapai dalam Pemilu. Hal ini juga digunakan kepengurusan partai di pusat yang memasang target perolehan suara sebesar 15% pada Pemilu 2024.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 91.

<sup>35</sup> Republika Online, "PKS Targetkan Raih 15 Persen Suara Di Pemilu 2024," last modified 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qq5qea487/pks-targetkan-raih-15-persen-suara-di-pemilu-2024>.